

DUALISME PENERIMAAN SARANA DAN PRASARANA DI HUNIAN TETAP PAGERJURANG KABUPATEN SLEMAN

Gardyas Bidari Adninda

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Email : gardyasadninda@amikom.ac.id

Diterima (received): 24 Januari 2019

Disetujui (accepted): 28 Maret 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan warga terhadap sarana prasarana yang ada di hunian tetap. Sarana prasarana yang diteliti adalah masjid, rumah produksi, balai dusun, gedung serbaguna, kandang kelompok, tempat pembuangan sampah terpadu, dan listrik. Lokasi penelitian terletak di Hunian Tetap Pagerjurang, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman. Lokasi ini dipilih karena memiliki informasi yang lengkap dan dapat digunakan untuk penelitian secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode induktif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Responden dipilih berdasarkan warga yang mengetahui proses pembangunan sarana prasarana dan pengguna utama sarana prasarana yang diambil secara proporsional dari ketiga blok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme di dalam penerimaan sarana prasarana yang ada di Hunian Tetap Pagerjurang. Sebagian warga mau menggunakan sarana prasarana dan sebagian lagi tidak mau. Kondisi fisik yang bagus, lokasinya yang ada di masing-masing blok, dan ketercukupan sarana prasarana merupakan alasan mengapa warga mau menggunakan sarana prasarana tersebut. Sebaliknya, warga yang tidak mau menggunakan sarana prasarana dikarenakan jarak sarana prasarana yang jauh, ketidaktahuan akan keberadaan sarana prasarana, ketidakjelasan kepemilikan sarana prasarana, dan kekecewaan warga terhadap perubahan siteplan.

Kata Kunci : hunian tetap, sarana prasarana, dualisme

A. PENDAHULUAN

Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 merupakan salah satu letusan besar dalam catatan sejarah terjadinya erupsi Gunung Merapi. Letusan eksplosif yang terjadi secara tiba-tiba tersebut menyebabkan 346 orang meninggal, 121 korban luka berat, dan 5 orang korban hilang (Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Pembangunan DIY, 2012). Permukiman yang terletak disekitar lereng Gunung Merapi mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa permukiman bahkan sampai terkubur oleh material yang keluar pada saat erupsi terjadi. Tercatat sekitar 2.682 rumah rusak berat dan tidak layak huni, 156 rumah rusak, dan 632 rumah rusak ringan (DPUP Sleman, 2013). Sedangkan kerugian materi yang dialami pemerintah dan masyarakat dalam berbagai sektor mencapai Rp 2.141 triliun.

Mulai tahun 2011 sampai 2013, pemerintah membuat rencana dan telah berhasil membangun rumah permanen atau hunian tetap (huntap) bagi para korban yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu beberapa infrastruktur lain yang sempat rusak karena bencana tersebut juga sempat diperbaiki. Pembangunan hunian tetap ini merupakan suatu program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani bencana erupsi Gunung Merapi yang difasilitatori oleh pihak REKOMPAK (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas). Menurut Kuswartojo (2010), pembangunan permukiman membutuhkan suatu perencanaan yang matang. Salah satunya bisa didasari dari watak para penghuninya. Terdapat dua macam penanganan pengembangan permukiman. Yang pertama adalah permukiman yang dibangun berdasarkan banyaknya permintaan. Yang kedua adalah karena adanya suatu kebijakan. Permukiman ini seperti halnya huntap dikatakan sebagai permukiman khusus. Pembangunan huntap dilaksanakan setelah adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi paska bencana erupsi Gunung Merapi. Bantuan yang disalurkan lewat program REKOMPAK berupa Bantual Dana Lingkungan (BDL), Bantua Dana Rumah (BDR), Komponen Pendampingan Masyarakat, dan Komponen Pendampingan Teknis. Dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut total sebesar Rp 770,903 milyar dengan rincian Rp 272,956 milyar untuk sektor infrastruktur, Rp 138,076 milyar untuk sektor permukiman, Rp 146,227 milyar untuk sektor ekonomi produktif, dan Rp 111,298 milyar untuk sektor sosial.

Terdapat sekitar 18 hunian tetap yang tersebar lokasi-lokasi yang lebih aman daripada lokasi rumah tinggal mereka sebelumnya. Hunian tetap tersebut tersebar di Umbulharjo (Huntap Bulak Susukan, Karangkendal, dan Plosokerep), Kepuharjo (Huntap Batur dan Pagerjurang), Wukirsari (Huntap Gondang 2, Gondang 3, dan Dongkelsari), Glagaharjo (Huntap Gading, Banjarsari, dan Jetis Sumur), Argomulyo (Huntap Kuwang dan Randusari), Sendangagung (Huntap Kisik, Gambretan, dan Cancangan), Sindumartani (Huntap Klenthingan dan Jlapan), dan beberapa huntap mandiri individu.

Kondisi kehidupan masyarakat korban bencana ini berubah drastis sejak terjadi letusan. Sebelumnya mereka tinggal di sebuah lingkungan pedesaan dengan halaman rumah yang luas, jarak antar rumah tidak berdempetan, dan lingkungan yang masih alami. Sebagian besar masyarakat dulunya memiliki pekerjaan sebagai petani, buruh, dan juga peternak. Namun kondisi hunian tetap yang sekarang membuat mereka sulit untuk melakukan aktivitas mereka sebelumnya. Lahan pertanian milik mereka sudah rusak dan jauh dari permukiman. Ditambah lagi ruang untuk beternak sangat terbatas.

Pembangunan hunian tetap merupakan salah satu proses pembentukan lingkungan baru yang perkembangannya pun tidak terjadi secara alamiah. Pada awalnya, hunian hanya dianggap sebagai barang konsumsi yang pasif dan statis. Namun lama kelamaan rumah disadari sebagai suatu kebutuhan sosial yang memungkinkan terjadinya rangsangan terhadap pembangunan selanjutnya (Budihardjo, 1998). Selain hunian dan lingkungan yang mempengaruhi masyarakat, ternyata perilaku masyarakat nantinya akan mempengaruhi lingkungan atau bahkan bisa juga mengubah lingkungan tersebut. Perilaku

masyarakat tersebut akan mempengaruhi kondisi lingkungan melalui kontrol perencanaan. Kondisi ini tergambar seperti lingkaran yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara *planning control*, *environment*, dan *behavior* (Porteous, 1977). Oleh karenanya pembangunan hunian tetap ini merupakan langkah awal pengembangan hunian bagi warga yang terdampak erupsi. Selain rumah, pembangunan sarana dan prasarana di hunian tetap juga telah disediakan. Masyarakat yang sudah mulai menempati hunian tetap melakukan adaptasi untuk dapat menyesuaikan di hunian yang baru. Adaptasi dilakukan mulai dari membiasakan diri untuk tinggal dengan warga dari beberapa dusun secara berdampingan sampai pada adaptasi untuk menggunakan sarana dan prasarana baru secara bersamaan.

Keberadaan sarana prasarana di suatu lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Namun dalam pembangunannya, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Pembangunan sarana prasarana juga harus memperhatikan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat sekitar sehingga pada akhirnya sarana prasarana tersebut dapat memberikan manfaat untuk masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut (Hester, 1984).

Begitu juga halnya yang terjadi di salah satu hunian tetap, yaitu Hunian tetap Pagerjurang. Hunian tetap ini memiliki sarana prasarana yang terhitung paling lengkap. Hunian tetap yang terletak di Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman ini merupakan salah satu hunian tetap yang memiliki jumlah lahan paling luas dan juga jumlah penduduk yang paling banyak. Kelengkapan sarana prasarana yang telah disediakan pada awalnya memberikan kesan baik terkait dengan ketersediaannya dan kondisinya (Mei, 2015). Namun ternyata setelah mereka tinggal disana, kondisi ini tidak selalu menimbulkan respon positif dari warga. Ditambah lagi dengan jumlah warga yang cukup banyak yang terdiri dari gabungan lima buah dusun. Kondisi yang tidak ideal ini kemudian memunculkan variasi penerimaan masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang telah disediakan.

Sampai saat ini, pembangunan hunian tetap merupakan salah satu program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat memulihkan kondisi masyarakat yang terkena dampak bencana. Oleh karena itu, informasi untuk perbaikan dan pembuatan inovasi dalam pembangunan sarana dan prasarana di hunian tetap merupakan salah satu elemen penting untuk melengkapi perencanaan pembangunan hunian tetap. Selain itu informasi ini juga penting untuk mendukung kehidupan sosial masyarakat serta menciptakan kenyamanan di lingkungan permukiman yang baru. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimanakah penerimaan warga terhadap sarana prasarana yang ada di Hunian Tetap Pagerjurang?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan induktif adalah penelitian yang dimulai dari pencarian dan pengumpulan data awal sebagai *background knowledge*. Langkah selanjutnya, pencarian data mengenai penerimaan masyarakat terhadap sarana prasarana yang

Gardyas Bidari Adninda, Dualisme Penerimaan Sarana dan Prasarana di Hunian Tetap Pagerjuran Kabupaten Sleman

ada di hantap dilakukan. Data tersebut kemudian diekstraksi untuk dicari makna yang sama yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan teori. Penelitian dengan pendekatan ini akan lebih berkonsentrasi pada saat prosedur pencarian data dan analisisnya (Djunaedi, 2000).

Data primer yang berupa hasil wawancara pada penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi utama dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen digunakan untuk melengkapi data utama. Data disajikan dalam bentuk deskriptif guna mengeksplorasi secara lebih detail mengenai penerimaan masyarakat terhadap sarana prasarana yang ada di Hunian Tetap Pagerjuran.

Unit amatan dalam penelitian ini adalah Hunian Tetap Pagerjuran yang terletak di Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Unit analisis dalam penelitian ini adalah penerimaan warga terhadap sarana prasarana yang ada di Hunian Tetap Pagerjuran. Terdapat tujuh jenis sarana prasarana yang akan dibahas didalam penelitian ini, yaitu masjid, balai dusun, gedung serbaguna, tempat pembuangan sampah terpadu, kandang kelompok, rumah produksi atau usaha, dan listrik. Penentuan sarana prasarana ini berdasarkan data fasilitas yang tertera di dalam data REKOMPAK. Analisis data utama berasal dari wawancara dengan informan yang merupakan penghuni hantap. Data selanjutnya dilengkapi dengan observasi lapangan dan beberapa dokumen terkait.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Peta siteplan hunian tetap Pagerjuran tahun 2014

Hunian tetap Pangerjurang adalah satu kawasan hunian tetap yang terletak di Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Hunian tetap ini memiliki luas lahan 50.365 m². Terdapat 301 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari beberapa dusun, yaitu: Dusun Petung 97 KK, Dusun Kaliadem 136 KK, Dusun Manggong 46 KK, Dusun Kepuh 14 KK, dan Pangerjurang 8 KK (REKOMPAK, 2013).

Hasil temuan data yang telah didapatkan dari observasi lapangan, catatan penulis, hasil wawancara, dan dokumen yang relevan diolah menjadi tema-tema sesuai dengan kesamaan diskusi.

1. Kondisi Fisik Sarana Prasarana yang Layak Pakai

Berdasarkan hasil analisis, kondisi fisik dari sarana prasarana di hunian tetap sudah bagus dan layak digunakan. Semua bangunannya dibuat permanen sehingga dapat bertahan lama, mulai dari masjid, balai dusun, gedung serbaguna, kandang kelompok, dan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST). Bahkan rumah produksi yang masih dalam tahap perencanaan pun rencananya akan dibangun permanen. Semua konstruksi bangunan juga dibuat tahan gempa sama seperti rumah-rumah yang ada di hunian tetap.

Kondisi lantai, dinding, dan atap bangunan semuanya sudah bagus dan bisa dikatakan layak didalam suatu bangunan. Meskipun beberapa bagian masih perlu diperbaiki, namun dalam perjalannya perbaikan ini masih sanggup dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Beberapa bagian dari sarana prasarana yang masih kurang juga dapat diusahakan secara swadaya dari masyarakat. Contohnya saja masjid yang membutuhkan gudang dan pagar. Beberapa saat yang lalu warga Blok Petung bergotong royong untuk membangun kebutuhan tambahan tersebut dengan menggunakan dana pribadi mereka.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kondisi sarana prasarana yang paling banyak memerlukan perbaikan adalah kandang kelompok. Penempatan beberapa bagiannya seperti tempat makan dan minum ternak masih kurang sesuai. Tempat pembuangan limbah sisa dari biogas dan limbah alas sapi yang biasanya berupa jerami kering juga belum disediakan. Jalan masuk menuju kandang belum bisa diakses oleh sapi sehingga masih perlu dibuatkan jalan tambahan lagi. Listrik dan sanitasi juga belum terpasang. Mengenai kondisi kandang, beberapa responden mengatakan kalau masih perlu untuk diperbaiki lagi sebelum digunakan.

Kondisi fisik yang mayoritas sudah layak digunakan ini memberikan keuntungan bagi warga untuk dapat memanfaatkan sarana prasarana secara langsung. Warga tidak perlu lagi mencari biaya untuk membangun dari awal. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat warga mau menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan.

2. Penempatan Sarana Prasarana di Masing-Masing Dusun

Penempatan lokasi sarana prasarana di hunian tetap memerlukan perencanaan yang matang yang disertai dengan persetujuan warga. Mengingat bahwa Hunian Tetap Pangerjurang ini merupakan gabungan dari lima dusun, maka perlu dipertimbangkan juga keterjangkauan sarana prasarana oleh semua dusun secara merata. Semua warga dari kelima dusun diharapkan bisa menjangkau semuanya dengan mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat kecenderungan warga dalam memakai sarana prasarana di hunian tetap. Warga cenderung untuk menggunakan sarana prasarana yang ada di wilayah dusunnya masing-masing. Dapat diambil contoh untuk sarana masjid. Masjid yang letaknya di perbatasan Dusun Petung dan Dusun Kaliadem hanya digunakan oleh warga Dusun Petung dan sedikit warga Dusun Kaliadem yang letak rumahnya berhadapan dengan masjid. Beberapa responden yang berasal dari dusun lainnya mengatakan bahwa masjid tersebut adalah Masjid Petung, yang mengartikan bahwa masjid tersebut milik Dusun Petung. Padahal dalam pembangunannya, masjid tersebut sebenarnya difungsikan untuk seluruh warga hunian tetap.

Warga Dusun Kaliadem sendiri beribadah di gedung serbaguna pada awalnya. Mereka beberapa kali mengajukan proposal bantuan pembangunan masjid dan juga perizinan untuk pembangunan masjid. Namun sampai saat ini perizinan pembangunan masjid tidak keluar walaupun sudah ada pihak swasta yang bersedia memberikan bantuan pembangunan masjid. Kemudian warga berinisiatif untuk membangun mushola kayu yang terletak di selatan gedung serbaguna. Mushola kayu tersebut merupakan mushola yang awalnya berada di lokasi wisata yang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Warga Dusun Kaliadem melakukan kegiatan ibadah di mushola tersebut walaupun sebenarnya letaknya sangat dekat dengan masjid. Serupa dengan Dusun Kaliadem, Blok Manggong juga pada awalnya melakukan sholat berjamaah di Balai Dusun. Namun berdasarkan pernyataan responden, sekarang Balai Dusun sudah tidak digunakan untuk sholat lagi karena jumlah jamaahnya yang semakin sedikit.

Selain masjid, tempat pertemuan warga yang biasanya digunakan juga yang berada di masing-masing dusun. Balai Dusun Petung digunakan oleh warga Petung dan Balai Dusun Manggong digunakan oleh warga Blok Manggong. Sedangkan untuk warga Dusun Kaliadem menggunakan gedung serbaguna untuk melakukan pertemuan rutin. Warga tidak segan untuk menggunakan balai-balai yang ada di dusunnya tersebut karena letaknya yang memang berada di wilayah dusunnya masing-masing. Mereka jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah, melakukan pertemuan di gedung di wilayah dusun lain.

3. Ketercukupan Sarana Prasarana

Pembangunan hunian tetap beserta sarana prasarananya tentu saja sudah direncanakan sebelumnya. Salah satu fokus utama dalam penyediaan sarana prasarana hunian tetap adalah pada ketercukupannya dalam menampung kegiatan warga. Dalam pembuatan rencana tersebut, sudah diperkirakan antara sarana prasarana yang akan dibangun dan jumlah warga yang akan menggunakan. Menurut data yang didapat, hampir semua sarana prasarana yang ada di hunian tetap sudah dapat menampung kebutuhan seluruh warga. Hanya terdapat TPST dan rumah produksi yang sampai saat ini belum diketahui ketercukupannya. Hal ini dikarenakan TPST sampai saat ini masih belum digunakan dan rumah produksi belum dibangun.

Ukuran dari masing-masing sarana prasarana telah disesuaikan dengan jumlah warga yang akan menggunakan. Seperti misalnya balai dusun, ukuran dari balai dusun ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan gedung serbaguna. Akan tetapi fungsi utamanya memang digunakan oleh warga Blok Petung dan Blok

Manggong yang jumlah warganya lebih sedikit daripada warga Blok Kaliadem. Jadi walaupun ukurannya relatif kecil, tapi masih bisa menampung kegiatan warga. Selain itu, kandang kelompok juga sudah dibuat sesuai dengan jumlah kelompok yang akan diberi bantuan. Terdapat lima kelompok dari ketiga blok yang akan diberi bantuan. Oleh karena itu disediakan lima buah kandang untuk masing-masing kelompok. Jumlah untuk tempat sapi juga sudah disesuaikan dengan jumlah sapi bantuan yang akan didatangkan.

4. Lokasi Sarana Prasarana yang Jauh Menurut Warga

Berdasarkan observasi, penempatan lokasi sarana prasarana di hunian tetap bisa dibilang sudah tepat. Peletakkannya sudah merata sesuai dengan fungsinya. Seperti misalnya Balai Dusun Petung dan Balai Dusun Manggong sudah diletakkan sesuai dengan lokasi dusunnya. Gedung serbaguna yang dimanfaatkan oleh seluruh warga diletakkan persis ditengah-tengah hunian tetap. Kemudian kandang kelompok juga sudah diletakkan di hunian tetap posisi paling pinggir.

Hasil yang ditemukan disini adalah beberapa warga (sebagian besar dari Blok Manggong dan Blok Kaliadem) masih merasa lokasi penempatan dari sarana prasarana tersebut jauh. Pernyataan ini dipengaruhi oleh posisi sarana prasarana yang tidak berada di wilayah dusun mereka masing-masing. Padahal menurut hasil observasi, sebenarnya sarana prasarana tersebut bisa dijangkau dengan berjalan kaki dengan mudah. Apalagi jika dibandingkan dengan di dusun mereka yang dulu, jarak dari rumah menuju sarana prasarana yang sekarang ini bisa dibilang sangat dekat. Namun pada kenyataannya sebagian warga merasa keberatan untuk menjangkau sarana prasarana dengan alasan jauh. Kondisi ini merupakan suatu kondisi yang sangat bergantung pada perspektif warga dari masing-masing dusun.

Menurut hasil wawancara dengan para responden yang tinggal di Blok Kaliadem dan Blok Manggong, lokasi penempatan yang kurang tepat adalah masjid dan TPST. TPST terletak di ujung paling bawah hunian tetap, wilayah Dusun Petung. Sebagian warga Blok Kaliadem dan Blok Manggong merasa keberatan karena prasarana ini berada di Blok Petung. Menurut hasil observasi, sebenarnya peletakan prasarana TPST diatas sudah tepat. TPST diletakkan di paling ujung bawah sehingga tidak mengganggu masyarakat terhadap bau yang ditimbulkan ketika terjadi penimbunan sampah dan juga pada saat proses pemilahan sampah. Sebagian warga selain dari Dusun Petung juga mengatakan kalau TPST tersebut adalah milik Dusun Petung. Padahal sebenarnya pihak REKOMPAK mengalokasikan TPST tersebut untuk seluruh warga hunian tetap.

Sarana Masjid berada di perbatasan Blok Petung dan Blok Kaliadem. Letak masjid juga sebenarnya tidak terlalu jauh dan dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Letaknya pun bukan berada di wilayah Dusun Petung paling selatan, namun berada di perbatasan antar dusun. Seharusnya lokasi ini bisa dikatakan cukup dekat untuk dijangkau seluruh warga bahkan warga yang letak rumahnya di ujung utara hunian tetap. Akan tetapi pada kenyataannya, sebagian warga memilih untuk melakukan ibadah di mushola kayu dan Balai Dusun Manggong yang letaknya sebenarnya berdekatan. Beberapa responden mengatakan kalau lokasi masjid ini cukup jauh untuk dijangkau.

5. Ketidaktahuan Warga Terhadap Keberadaan Sarana Prasarana

Beberapa kesalahan yang terjadi di Hunian tetap Pangerjurang ini adalah ketidaktahuan warga akan adanya beberapa sarana prasarana. Salah satunya adalah tempat pembuangan sampah terpadu (TPST). TPST ini diletakkan di lokasi paling bawah hunian tetap, tepatnya di Blok Petung. Ketika dilakukan wawancara, beberapa responden ternyata tidak mengetahui keberadaan TPST tersebut. Sebagian besar justru menjawab tempat pembuangan sampah yang ada di dusun masing-masing. Padahal ketika pembuatannya, TPST ini difungsikan untuk tempat pembuangan sampah sekaligus pengolahan sampah bagi warga di seluruh hunian tetap. Namun pada kenyataannya, banyak warga yang tidak mengetahui hal tersebut. Mereka kemudian berinisiatif untuk membuat tempat penampungan sampah di blok masing-masing sebelum sampah-sampah tersebut akan dibuang.

Selain itu, sarana rumah produksi juga ternyata tidak banyak diketahui warga. Di dalam dokumen REKOMPAK, disebutkan bahwa terdapat 7 fasilitas yang telah dibangun di hunian tetap, salah satunya adalah rumah produksi. Namun ketika wawancara dilakukan, banyak responden yang tidak mengetahui adanya rumah produksi tersebut. Mereka justru mengatakan bahwa rumah produksi akan segera dibangun yang sekarang ini baru sampai pada tahap perencanaannya. Beberapa informan memaparkan rencana pembangunan rumah produksi yang akan dibangun untuk masing-masing dusun dan juga satu bangunan untuk ruang pameran. Ketika ditelusuri lebih lanjut, ternyata rumah produksi yang dimaksudkan oleh pihak REKOMPAK ada sebuah bangunan non permanen yang letaknya di Blok Manggong. Rumah produksi ini merupakan bantuan dari CSR PT Bluescope yang dibangun untuk warga hunian tetap. Pada prakteknya, ternyata rumah produksi ini hanya digunakan oleh warga untuk pameran. Bahkan warga dari luar hunian tetap juga ikut menggunakan rumah produksi ini untuk memajang hasil produksi mereka. Karena tidak semua warga mengetahui hal tersebut, maka akhirnya warga tidak menggunakan rumah produksi tersebut lagi.

6. Ketidakjelasan Kepemilikan Sarana Prasarana

Hunian Tetap Pangerjurang yang terdiri dari lima dusun ini dibangun di suatu kawasan yang sama. Terdapat tujuh sarana dan prasarana yang telah dibangun pihak REKOMPAK di Hunian Tetap Pangerjurang. Masjid, rumah produksi, balai dusun, gedung serbaguna, kandang kelompok, TPST, dan listrik semua dibangun untuk seluruh warga hunian tetap. Tidak ada batasan penggunaan walaupun lokasi sarana prasarana tersebut berada di wilayah dusun lain. Namun sampai saat ini warga tidak mengetahui secara jelas perihal kepemilikan tersebut. Mereka masih berpikir bahwa kepemilikan sarana prasarana ini bergantung dari letaknya.

Sejak awal dibangun sampai selesai, tidak ada kepastian mengenai kepemilikan dari sarana prasarana yang ada disana. Pihak REKOMPAK juga tidak menjelaskan secara rinci bahwa kepemilikan sarana prasarana tersebut adalah milik bersama. Setelah selesai dibangun pun tidak ada serah terima sarana prasarana dari pihak REKOMPAK kepada warga. Hal ini membuat warga bingung akan kepemilikan sarana prasarana tersebut. Akibatnya warga hanya merasa memiliki sarana prasarana yang letaknya berada di lokasi dusunnya masing-masing sehingga warga juga cenderung hanya merawat sarana prasarana yang ada di dusunnya masing-masing.

Satu-satunya sarana yang diserahterimakan adalah gedung serbaguna. Gedung serbaguna merupakan bantuan dari Koran Kedaulatan Rakyat untuk warga Hunian Tetap Pangerjurang. Setelah selesai dibangun, gedung ini diserahterimakan kepada warga.

7. Kekecewaan Warga Terhadap Perubahan Siteplan

Pembangunan sarana prasarana di hunian tetap direncanakan oleh pihak REKOMPAK dan kemudian disosialisasikan kepada warga. Diskusi dengan warga ini sangat menentukan persetujuan warga akan bangunan sarana prasarana di wilayah hunian tetap. Pada akhirnya siteplan yang dibuat tersebut telah disetujui oleh warga dari ketiga blok. Hal ini sedikit berbeda dengan perencanaan rumah hunian yang memang sejak awal direncanakan oleh warga sendiri.

Didalam siteplan, selain kandang kelompok, TPST, listrik, dan rumah produksi, terlihat bahwa terdapat tiga balai dusun, tiga gedung PAUD, dan juga tiga masjid. Masing-masing blok direncanakan akan memiliki ketiga paket sarana tersebut. Warga sudah setuju dan sangat berharap terhadap pelaksanaan pembangunan sarana tersebut. Namun pada kenyataannya ternyata tidak semua sarana yang telah tergambar di dalam siteplan direalisasikan. Masjid yang rencananya akan dibangun tiga unit ternyata hanya dibangun satu unit saja di Dusun Petung. Balai dusun akhirnya hanya dibangun dua buah. Gedung PAUD yang rencananya akan dibangun tiga unit malah tidak dibangun sama sekali. Hal ini menimbulkan kekecewaan di dalam diri warga yang tadinya memiliki espektasi yang tinggi terhadap pembangunan sarana tersebut. Ditambah lagi, perubahan ini ternyata tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada warga. Tiba-tiba saja pihak REKOMPAK mengganti siteplan yang tadinya sudah disepakati dan membangun sesuai siteplan yang baru.

Setelah semua sarana prasarana selesai dibangun, ternyata pihak REKOMPAK tidak memberitahukan perihal tersebut kepada warga. Bahkan sampai sekarang ini, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa terjadi perubahan siteplan dari kesepakatan awal. Kekecewaan warga juga bertambah ketika ada insiden pembongkaran gedung PAUD yang berasal dari bantuan Bank Mandiri. Beberapa saat setelah hunian tetap selesai dibangun, Bank Mandiri memberikan bantuan pendirian bangunan permanen untuk gedung PAUD yang diletakkan di Blok Manggong. Pada saat proses pembangunan sudah hampir selesai, ternyata pihak REKOMPAK tidak menyetujui adanya pembangunan gedung PAUD di lokasi tersebut. Pihak REKOMPAK kemudian merobohkan bangunan gedung yang pembangunannya hanya kurang atapnya saja. Alasan dari pembongkaran tersebut menurut beberapa responden masih tidak jelas. Beberapa responden mengatakan bahwa pihak REKOMPAK membongkar gedung PAUD karena lokasi yang digunakan untuk membangun gedung PAUD seharusnya digunakan untuk ruang terbuka hijau. Padahal apabila dilihat pada siteplan yang telah disepakati di awal, lokasi tersebut memang dialokasikan untuk membangun gedung PAUD.

D. DISKUSI

Keseluruhan tema yang telah dipaparkan menunjukkan adanya kecenderungan yang mengarah pada jenis penerimaan warga terhadap sarana dan prasarana di

Hunian tetap Pagerjurang. Perbedaan penerimaan tersebut terjadi karena perubahan pola kehidupan sosial di lokasi. Penerimaan bisa menjadi kontroversi, antara warga yang menolak dan menerima perubahan tersebut (Karim, 2012). Begitu pula yang terjadi di Hunian Tetap Pagerjurang. Dapat disimpulkan dari tema-tema hasil analisis bahwa penerimaan terbagi menjadi dua konsep, yang pertama adalah warga yang mau menggunakan sarana prasarana dan warga yang tidak mau menggunakan sarana prasarana.

1. Perilaku Warga yang Mau Menggunakan Sarana Prasarana

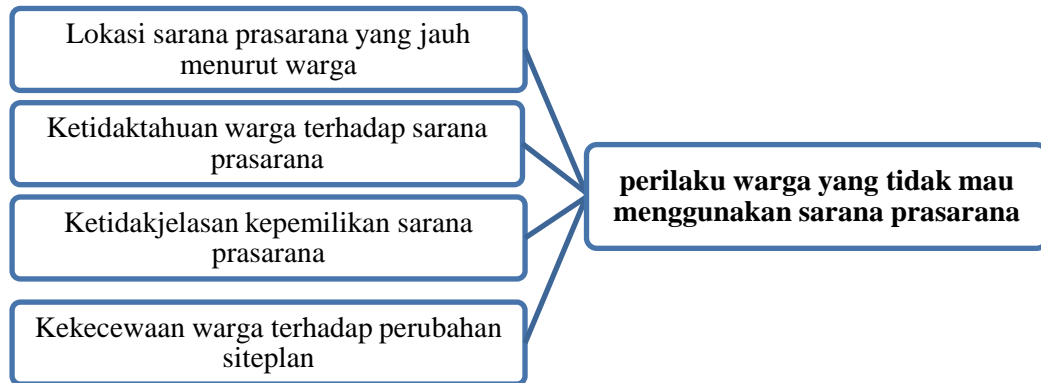


Gambar 2. Bagan pemetaan konsep warga yang mau menggunakan sarana prasarana

Perilaku penerimaan warga terhadap sarana prasarana di hunian tetap tercermin dari perilaku warga dalam menggunakan dan merawat sarana prasarana yang ada. Perilaku pemanfaatan sarana prasarana tersebut bersifat sangat subyektif, bergantung pada perspektif masing-masing warga. Seperti misalnya penempatannya yang ada di suatu dusun milik warga, pastinya akan digunakan oleh warga yang tinggal di dusun tersebut. Warga merasa memiliki dan merasa bebas untuk menggunakan suatu sarana prasarana apabila terletak di dusunnya. Faktor penempatan ini berpengaruh dalam perilaku penggunaan sarana prasarana. Misalnya warga Dusun Petung mengatakan kalau masjid tersebut sudah diletakkan di posisi yang tepat dan mereka mau menggunakan dan merawat masjid tersebut. Sedangkan untuk warga Dusun Kaliadem, mereka mengatakan kalau posisi masjid masih kurang tepat dan mereka tidak mau menggunakan masjid. Perspektif dari masing-masing warga ini lah yang mempengaruhi perilaku dalam pemanfaatan. Sarana prasarana yang ditempatkan di wilayah dusun lebih cenderung untuk diterima, digunakan, dan dirawat oleh warga dusun tersebut.

Kondisi sarana prasarana juga mempengaruhi warga dalam menggunakan sarana prasarana tersebut. Kondisi fisik yang layak pakai merupakan salah satu faktor yang mendorong warga untuk mau menggunakan sarana prasarana yang telah disediakan. Selain itu, luasan sarana yang mencukupi kegiatan warga juga membuat mereka mau menggunakan sarana tersebut. Warga yang mau menggunakan sarana prasarana juga cenderung merasa memiliki sarana prasarana tersebut. Mereka kemudian bersedia untuk melakukan perawatan terhadap sarana prasarana tersebut.

2. Perilaku Warga yang Tidak Mau Menggunakan Sarana Prasaran



Gambar 3. Bagan pemetaan konsep warga yang tidak mau menggunakan sarana prasarana

Hunian Tetap Pagerjurang ini merupakan suatu hunian gabungan dari lima dusun. Maka pada proses pembangunannya perlu dipertimbangkan juga keterlibatan masyarakat dalam merencanakan pembangunan sarana prasarana yang ada didalamnya. Sebagai pengguna, masyarakat diharapkan dapat merasa memiliki semua sarana prasarana yang ada disana. Apabila didalam perencanaannya masyarakat ikut diajak dalam perencanaannya, maka warga kemungkinan besar akan menghargai dan merasa memiliki sarana prasarana tersebut. Pada kasus perubahan siteplan, warga pada akhirnya merasa tidak dihargai dan kecewa karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya warga menjadi malas dan tidak mau menggunakan beberapa sarana prasarana yang telah dibangun.

Penggunaan sarana prasarana di Hunian Tetap Pagerjurang belum cukup maksimal. Terutama pada penggunaan masjid yang masih belum maksimal digunakan oleh keseluruhan warga hunian tetap. Padahal pembuatan masjid ini sebenarnya difungsikan untuk kegiatan berjamaah seluruh warga hunian tetap. Disamping itu, penggunaan tidak maksimal lainnya adalah TPST yang sampai sekarang bahkan belum digunakan sama sekali. Perilaku masyarakat yang tidak mau menggunakan sarana prasarana ini akhirnya menimbulkan batasan antar dusun yang semakin kentara. Hunian Tetap Pagerjurang yang terdiri dari gabungan lima dusun ini masih berada dalam proses penyesuaian diri untuk tinggal bersama didalam satu kawasan hunian. Kenyamanan tinggal yang tadinya hanya satu dusun sekarang harus dibangun lagi dengan warga antar dusun lain.

Hal tersebut telah menimbulkan konflik sosial, salah satunya ketidakharmonisan warga. Mereka belum bisa beradaptasi di lingkungan tempat tinggal yang berdekatan dengan dusun lain. Semua kegiatan warga masih dipisah, bahkan cenderung tidak mau digabung sama sekali. Mereka menginginkan kegiatan perayaan yang terpisah. Bahkan anak-anak kecil disana pun juga tidak menginginkan kegiatan tersebut digabung. Adanya permasalahan mengenai sarana prasarana ini membuat batas antar dusun menjadi sangat terlihat. Warga yang dulunya terbiasa memiliki sarana prasarana di masing-masing dusunnya secara

tidak sadar juga menginginkan hal yang sama di lingkungan hunian tetap ini. Padahal sekarang mereka sudah tinggal bersama dengan dusun lain di dalam satu kawasan, yang artinya mereka seharusnya bisa menggunakan sarana prasarana yang sudah disediakan secara bersama. Belum selesainya proses adaptasi masyarakat, ditambah dengan ketidaknyamanan terhadap penyediaan sarana prasarana yang ada, akhirnya berdampak pada perilaku masyarakat dalam menggunakan sarana prasarana tersebut.

Sebagai contoh misalnya, Blok Kaliadem dan Blok Manggong pada akhirnya mengadakan kegiatan ibadah sendiri di wilayah dusunnya masing-masing walaupun letak masjid juga bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Karena tidak memiliki masjid, pada awalnya mereka memaksakan keadaan untuk melakukan sholat berjamaah di gedung serbaguna (Blok Kaliadem) dan Balai Dusun Manggong (Blok Manggong). Padahal letak gedung serbaguna dan Balai Dusun manggong juga sangat dekat, hampir berhadapan malah. Namun mereka tetap mengadakan kegiatan ibadah sendiri-sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa yang paling penting untuk warga adalah bukan jauh atau dekatnya, namun lokasi dari masing-masing kegiatan, apakah diadakan di dusunnya sendiri atau tidak.

Pada akhirnya, perilaku masyarakat ini akan berdampak pada kepedulian mereka terhadap sarana prasarana yang ada. Karena merasa tidak puas atau bahkan merasa tidak memiliki sarana prasarana yang ada, warga cenderung untuk tidak merawat sarana prasarana tersebut. Contohnya saja banyak sarana prasarana yang sering tidak dibersihkan oleh warga. Kesadaran warga yang kurang ini salah satunya merupakan akibat dari kekecewaan masyarakat yang telah memiliki ekspektasi tinggi terhadap sarana prasarana yang ada. Akibatnya warga tidak merasa bertanggungjawab untuk ikut menjaga dan membersihkan sarana prasarana tersebut.

Sampai saat ini, belum ada upaya untuk mencari solusi dari adanya ketidakharmonisan tersebut. Setelah pembangunan hunian tetap selesai pun tidak ada pembinaan lebih lanjut untuk membangun keharmonisan warga. Selama ini kegiatan warga yang masih terpisah semakin membuat mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Batasan administratif dusun pun juga masih terbagi menjadi lima dusun. Padahal tiga dari lima dusun yang ada disana sudah tidak utuh lagi. Kondisi yang seperti ini akan semakin mempersulit warga kedepannya. Dikhawatirkan ketidakharmonisan ini akan memicu timbulnya konflik sosial yang lebih besar.

3. Dualisme Penerimaan

Berdasarkan keseluruhan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana yang ada di hunian tetap sudah layak digunakan dari segi kondisi fisiknya. Kualitas bahan bangunan yang dipakai sudah bagus. Terdapat beberapa kekurangan saja yang masih membutuhkan perbaikan setelah sekitar satu tahun dibangun. Namun hal tersebut masih bisa dibilang cukup wajar. Pada bagian fisik lain kualitasnya juga sudah bagus. Semua sarana prasarana telah diperhitungkan dapat mencukupi kegiatan warganya dengan masing-masing fungsinya sehingga ukuran dari setiap bangunan sudah disesuaikan. Selama ini tidak ada keluhan yang mengatakan kalau sarana prasarana yang telah dibangun ini masih tidak mencukupi. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa warga mengatakan bahwa

penempatan lokasi sarana prasarana sudah tepat. Ketepatan tersebut cenderung mengarah kepada sarana prasarana yang terletak di dusunnya. Apabila letaknya berada di dusun lain, mereka akan mengatakan bahwa lokasi penempatan sarana prasarana tersebut masih kurang tepat.

Temuan diatas mengindikasikan adanya penerimaan positif dari warga terhadap sarana prasarana yang ada di Hunian Tetap Pangerjurang. Penerimaan tersebut terlihat dari cara masyarakat dalam menggunakan sarana prasarana yang ada. Mereka mau memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan aktivitas mereka. Selain itu warga juga turut merawat sarana prasarana yang mereka terima. Walaupun tidak semua warga secara rutin selalu membersihkan, akan tetapi ada warga yang merasa bertanggungjawab untuk membersihkan sarana prasarana tersebut.

Menurut observasi, sebenarnya lokasi sarana prasarana di Hunian Tetap Pangerjurang sudah diletakkan di posisi yang tepat. Pertimbangan peletakkan lokasi pada saat perencanaan pun sudah sesuai. Namun ternyata berdasarkan hasil wawancara dengan warga, mereka tidak sependapat dengan hal tersebut. Banyak informan yang menilai kalau posisi yang tepat itu maksudnya persis ditengah-tengah hunian tetap. Padahal sebenarnya, sarana prasarana tersebut tetap masih bisa dijangkau. Hal ini kemudian memunculkan sisi kedua dari penerimaan masyarakat terhadap sarana prasarana di hunian tetap. Sebagian masyarakat tidak mau menggunakan sarana prasarana yang sudah disediakan. Mereka kemudian mengusahakan hal lain untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut seperti misalnya beribadah di gedung serbaguna dan balai dusun.

Perilaku masyarakat yang seperti ini salah satunya bisa juga dikarenakan sarana prasarana yang tadinya direncanakan akan dibangun di masing-masing dusun tidak jadi direalisasikan. Hal ini akhirnya menimbulkan kekecewaan dari warga yang tadinya memiliki harapan besar untuk memiliki satu paket masjid, balai dusun, dan gedung PAUD di dusun mereka masing-masing. Menurut wawancara dengan beberapa responden, mereka mengatakan bahwa perubahan siteplan ini juga tidak melalui pemberitahuan kepada warga terlebih dahulu. Perubahan rencana tersebut tidak disampaikan oleh warga dan malah langsung dilakukan pembangunan. Hal ini lah yang menimbulkan kekecewaan warga.

Dua arah penerimaan ini memunculkan dualisme di dalam lingkungan warga mengenai penerimaan sarana prasarana yang ada di Hunian tetap Pangerjurang. Dualisme merupakan suatu kondisi di dalam warga dimana warganya terbagi menjadi dua arah dalam perilakunya sebagai respon terhadap sarana prasarana yang disediakan di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian warga mau menggunakan dan merawat dan sebagian lagi tidak mau menggunakan dan merawat. Dualisme penerimaan warga tersebut akhirnya berdampak pada penggunaan sarana prasarana yang ada di hunian tetap. Selama ini, penggunaan sarana prasarana tersebut menjadi belum maksimal. Kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana prasarana juga masih kurang. Warga cenderung tidak peduli dan tidak mau membersihkan sarana prasarana secara rutin karena warga tidak merasa memiliki. Selain itu, sampai saat ini warga memang belum bisa beradaptasi untuk menggunakan sarana prasarana secara bersama-sama di

lingkungan hunian tetap. Mereka terbiasa memiliki dan menggunakan sarana prasarana mereka sendiri ketika masih berada di dusunnya dulu.

Kondisi ini masih terbawa sampai sekarang ketika mereka sudah hidup berdampingan dengan warga dusun lain di satu kawasan hunian tetap. Pada kondisi sekarang ini, sudah mulai muncul ketidakharmonisan sosial di lingkungan hunian tetap. Warga yang tinggal disana masih memegang teguh sifat kedusunannya masing-masing sehingga masih sulit untuk membaaur menjadi satu. Dikhawatirkan apabila dibiarkan secara terus menerus, maka ketegangan sosial akan mengganggu kenyamanan tinggal warga yang hidup di lingkungan hunian tetap itu sendiri.

Teori lokal dualisme yang terjadi didalam lingkungan warga ini bisa terjadi karena adanya kekecewaan didalam diri warga sehingga akhirnya menimbulkan penolakan-penolakan. Kekecewaan tersebut merupakan akibat dari adanya pelanggaran atau penyimpangan dari komitmen awal kesepakatan. Apalagi suatu keputusan yang telah disepakati di awal oleh semua pihak sifatnya menjadi sangat sensitif apabila terjadi pelanggaran. Ditambah lagi tidak ada pemberitahuan kepada salah satu pihak mengenai hal ini. Akibatnya muncul kekecewaan yang cukup besar sehingga sampai membuat pihak tersebut menjadi tidak mau menggunakan sarana prasarana yang telah disediakan.

E. KESIMPULAN

Pembangunan sarana prasarana di Hunian Tetap Pangerjurang ini menimbulkan berbagai macam pandangan masyarakat mulai dari kondisi fisiknya, ketepatan lokasinya, ketercukupan prasarannya, dan juga hal ini menimbulkan reaksi dari masyarakat yang berkaitan dengan perilaku penggunaan dan perawatan. Muncul kondisi dualisme penerimaan di dalam lingkungan warga sehingga kondisi penerimaan warga terbagi menjadi dua arah. Hal ini berdampak pada perilaku respon terhadap sarana prasarana yang disediakan. Kondisi tersebut membagi warga menjadi dua kelompok, yaitu warga yang mau menggunakan sarana prasarana dan warga yang tidak mau menggunakan sarana prasarana.

Warga yang mau menggunakan sarana prasarana didorong karena kondisi fisik dari sarana prasarana yang ada di hunian tetap sebagian besar sudah layak untuk digunakan kecuali kandang kelompok yang masih memerlukan banyak perbaikan. Selain itu, luasan ukuran sarana prasarana juga memungkinkan semua warga untuk melakukan kegiatan didalamnya. Faktor terakhir digunakannya sarana prasarana adalah letaknya yang sesuai dengan dusun tempat tinggal. Warga akan cenderung lebih memanfaatkan sarana prasarana yang ada di lingkungan dusunnya.

Warga yang tidak mau menggunakan sarana prasarana di hunian tetap belum memanfaatkan sarana prasarana secara maksimal. Lokasi penempatan sarana prasarana yang jauh menurut warga membuat warga tidak menggunakan sarana prasarana tersebut. Ditambah lagi dengan kekecewaan warga akan perubahan siteplan dan ketidaktahuan warga akan keberadaan sarana prasarana tersebut. Warga juga kurang memahami sistem kepemilikan bersama dari sarana prasarana yang ada di hunian tetap. Akibatnya kesadaran warga untuk ikut membersihkan prasarana secara rutin juga masih kurang.

Gardyas Bidari Adninda, Dualisme Penerimaan Sarana dan Prasarana di Hunian Tetap Pangerjurang Kabupaten Sleman

Diharapkan selanjutnya dilakukan upaya untuk mempersatukan warga dari dusun-dusun yang ditempatkan di satu hunian tetap yang sama. Bukan hanya fisik lingkungan mereka saja yang disatukan, akan tetapi hubungan sosial mereka juga perlu untuk disatukan. Salah satunya dapat melalui sosialisasi ataupun pembinaan secara rutin mengenai keharmonisan masyarakat untuk tinggal bersama dalam satu hunian yang harus terus dilakukan sampai masyarakat dari semua dusun bisa hidup berdampingan. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan kenyamanan untuk tinggal dan juga nantinya akan berdampak pada perilaku penggunaan dan perawatan sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Djunaedi, Achmad. 2000. Kumpulan Bahan Kuliah Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada.
- Budihardjo, Eko. 1988. Percikan Masalah Arsitektur Perumahan dan Perkotaan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hester, Randolph T. 1984. Planning Neighborhood Space With People. New York: Van Nostrand Reinhold Company Inc.
- Karim, Hafazah Abdul dan Hashim, Amalia Haslyssa. 2012. The Effect of a Resettlement Scheme on the Social-Cultural Changes of the Temuan Community. Malaysia: Centre for Environment-Behaviour Studies.
- Kuswartojo, Tjuk. 2010. Permukiman dan Perkotaan, Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan Hidup dan Pemukiman. Bandung : SAPPK ITB.
- Mei, Estuning Tyas, et. al. 2015. Resettlement Following the 2010 Merapi Volcano Eruption. Procedia – Social and Behavioral Sciences.
- Porteous, J. Douglass. 1977. Environment and Behavior, Planning and Everyday Urban Life. USA : Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Rekompak. 2012. Build Back Better, Menuju Penataan Permukiman yang Lebih baik. Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum.